

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Turki secara historis mengalami berbagai perubahan dan pengalaman yang ekstensif baik secara domestik hingga kawasan. Turki sebagai negara yang mendominasi wilayah Asia Minor atau Anatolia memiliki implikasi strategis dan terlibat kuat terhadap dinamika di antara Eropa dan Timur Tengah. Keterlibatan Turki dalam dinamika geopolitis, kultural, hingga ekonomi kawasan dipahami terlihat sejak era Kekaisaran Ottoman di abad ke-16 yang mana muncul sebagai *superpower* dari Timur Eropa dan pemeran utama dalam sistem *balance of power* Eropa (İnalcik, 1997). Secara identitas domestiknya, Kekaisaran Ottoman dapat dipahami sebagai Kerajaan Muslim Turki dengan keterlibatan nilai islamis yang kuat dengan konstruksi ‘Islam Ottoman’ yang menetapkan otoritas sultan yang lebih tinggi dari kode-kode Islam umum (Ergul, 2012). Identitas imperialistik dan pembentukan kultur logika di era Ottoman dipahami berkontribusi dalam proses pembentukan Turki modern melalui berbagai titik balik perubahan. Seiring dengan pergeseran norma global dan identitas yang mendominasi, Turki sebagai negara turut bergeser sesuai dengan identitas budaya yang mendominasi secara domestik.

Perkembangan identitas Turki melalui serangkaian peristiwa historis memberikan berbagai variasi budaya dan *values* atau nilai-nilai yang cukup berbeda, menyesuaikan dengan perkembangan dinamika dan identitas dunia yang mendominasi. Dinamika eksternal di era Ottoman turut menghadirkan ancaman berupa kebangkitan Kerajaan Rusia pada abad ke-18, yang menghadirkan sebuah bentuk persepsi ancaman bagi konsolidasi posisi Kekaisaran Ottoman. Dengan kuatnya penekanan akan nilai teologis antara Islam dan Kristen, Kekaisaran Ottoman kerap dikucilkan seiring dengan menguatnya dominasi Kerajaan Rusia dalam perpolitikan Eropa pasca keruntuhan Napoleon bersamaan dengan kemunduran Kekaisaran Ottoman. Perang Dunia I menjadi titik balik dari akhir Kekaisaran Ottoman dan pembentukan Turki modern di bawah Mustafa Kemal Atatürk dengan nilai-nilai Barat, demokratis, dan sekuler (İnalcik, 1997). Pergeseran identitas yang cenderung kontras tersebut menjadi bentuk titik balik dan contoh atas usaha untuk membentuk persepsi yang berintegrasi dan setara dengan negara-negara di Eropa.

Keterlibatan Turki dalam dinamika pertahanan kawasan Eropa terus berkembang pasca Perang Dunia II, khususnya melalui integrasi Turki terhadap aliansi NATO. Turki pada dasarnya

merupakan anggota NATO sejak tahun 1952 dan memenuhi peran strategis yang kuat dalam NATO dan stabilitas keamanan kawasan. Posisi keanggotaan Turki dalam NATO turut diyakini menjadi aset penting akan posisi geografisnya yang memenuhi peran dalam melindungi perbatasan NATO di sisi tenggara pada era Perang Dingin (Ministry of Foreign Affairs Republic of Türkiye, t.t.). Hal ini dapat dipahami sebagai kesejajaran Turki dengan nilai-nilai Barat Eropa. Melalui logika pemahaman konsep aliansi, Turki dengan NATO diekspektasikan memiliki prediksi perilaku Turki yang cenderung lebih dekat dengan sekutunya dan menempuh tindakan yang lebih kontradiktif terhadap Rusia. Namun, realita yang terjadi justru menunjukkan bahwa Turki cenderung membangun hubungan yang positif dalam beberapa aspek dan lebih menunjukkan tanda untuk lebih terbuka dalam wilayah Laut Hitam yang turut menunjukkan potensi perkembangan hubungan yang kuat dengan Rusia (Wallace, 2020).

Turki sebagai salah satu anggota NATO, yang turut mewakili keselarasan nilai Barat dan posisi yang cukup kontradiktif terhadap Rusia, justru bersedia untuk membangun hubungan konstruktif dengan Rusia hingga ke titik keberhasilan dalam kesepakatan pembelian S-400 dari Rusia. Di tengah pola negara-negara Barat yang semakin memperkuat sanksi terhadap Rusia, terutama melalui CAATSA dalam membatasi pergerakan ekonomi industri pertahanan Rusia, Turki justru memilih untuk menunjukkan ketertarikan dalam memperoleh sistem pertahanan udara Rusia dalam bentuk sistem pertahanan misil S-400 “Triumph” atau SA-21 “Growler”. Turki sebagai satu-satunya negara NATO yang berhasil mencapai kesepakatan pembelian dari negara yang dianggap sebagai musuh utama NATO, terutama dalam konteks Rusia, menghadapi berbagai kecaman yang berujung pada pengeluaran Turki dari rangkaian program F-35 yang telah direncanakan dan didanai sebelumnya oleh pemerintah Turki (Goncharenko, 2019). Kompleksitas relasi antara Turki dengan NATO yang terbentuk secara kuat dalam fenomena akuisisi S-400 dipahami terpengaruhi melalui berbagai perpaduan faktor-faktor yang berperan dan berujung pada keputusan pembelian sistem pertahanan Rusia oleh Turki.

Fenomena akuisisi S-400 oleh Turki dari Rusia dapat dipahami erat dengan kepentingan masing-masing aktor yang terlibat, terutama dengan kontras nilai kepentingan yang dimiliki. Dari sisi Rusia, penjualan S-400 dapat dipahami sebagai bentuk peran pemerintah Rusia melalui industri pertahanannya sebagai salah satu faktor kebijakan internasional dan dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuannya (Wong, 2020). Namun, yang menjadi pertanyaan adalah keunikan fenomena ekspor sistem pertahanan udara Rusia dari perspektif Turki dan implikasinya terhadap sekutu Turki. Sistem pertahanan S-400 yang dibeli

oleh Turki dipercaya sebagai sistem misil berteknologi tinggi jika dibandingkan dengan sistem misil Prancis dan Amerika Serikat dan memiliki harga yang lebih murah dari misil buatan Amerika Serikat, Patriot-2 (Goncharenko, 2019). Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang tinggi bagi sekutu Turki, terutama Amerika Serikat, yang mana akuisisi sistem tersebut berpotensi mengancam kerahasiaan teknologi F-35 melalui sistem yang dimiliki S-400 (Kasapoğlu dan Ülgen, 2018). Keputusan Turki untuk terus melanjutkan kesepakatan pembelian S-400 meskipun mendapat kritik dan konsekuensi yang keras dari sekutunya dipahami menunjukkan adanya faktor lain yang cukup unik dalam mendorong Turki sehingga sanggup untuk memperoleh sistem pertahanan di luar ekosistem NATO.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini penting untuk diteliti. (1) Memahami bagaimana Turki sebagai negara dengan letak geografis yang strategis memenuhi kebutuhan pertahanannya dan mempraktikkan diplomasi untuk menekankan kepentingan negara di tengah NATO dan Rusia. (2) Instrumentalisasi faktor pertahanan dalam mempengaruhi dinamika geopolitik kawasan yang terbentuk dan didorong baik oleh faktor domestik dan eksternal. Dan (3) memahami akan bagaimana pergeseran pemikiran Turki mampu mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Turki, terutama dalam konteks kontestasi nilai budaya strategis Turki yang mendominasi.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Turki memutuskan untuk mengimpor sistem pertahanan S-400 dari Rusia meskipun Turki merupakan anggota NATO?

1.3 Tinjauan Pustaka

Kontroversi mengenai transaksi S-400 antara Turki dengan Rusia telah banyak dikaji dan dibahas oleh berbagai peneliti melalui tulisan-tulisan ilmiah. Dalam memahami pola terbentuknya transaksi tersebut, penulis akan berfokus pada kajian-kajian dan perspektif akademis melalui kajian ilmiah terdahulu yang memiliki korelasi tertentu dengan topik tulisan ini. Pola pemikiran literatur pertama dibahas melalui tulisan Şaban Kardaş (2019) dan Jakob Lindgaard dengan Moritz Pieper (2020) yang berargumen bahwa keputusan Turki merupakan reaksi dari ketidakpastian aliansi di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan kerenggangan relasi dengan NATO yang mendorong Turki untuk mempertahankan dirinya. Pola pemikiran literatur kedua dibahas melalui tulisan Sıtkı Egeli (2018), Mustafa Kibaroglu (2019), dan poin tertentu dari Colin Giacomini (2019) yang menekankan bahwa keputusan Turki dilatarbelakangi oleh kepentingan geopolitik kawasan, memenuhi urgensi pertahanan, dan

pengembangan industri pertahanan domestik Turki. Pola pemikiran literatur terakhir dipahami melalui tulisan Colin Giacomini (2019) dan Şahin Selin (2019) yang berfokus dalam kepentingan Turki dalam penguatan kerjasama strategis dengan Rusia.

Reaksi Turki terhadap ketidakpastian aliansi, khususnya NATO dan Amerika Serikat, menjadi perhatian khusus dalam tulisan oleh Şaban Kardaş (2019) yang menekankan bahwa sebelum akuisisi S-400 telah terjadi keretakan hubungan antara Turki dan Amerika Serikat. Frustrasi terhadap kepemimpinan aliansi Amerika Serikat dan ketakutan atas ketidakpastian yang semakin berkembang mendorong Turki untuk akuisisi S-400. Frustrasi Turki terhadap NATO turut diperkuat dengan persepsi akan minimnya solidaritas NATO dengan lingkungan kawasan Turki yang turbulen, diperkuat dengan komplikasi domestik Turki, intensi untuk otonomi dalam kawasan internasional, dan mulai berkurangnya pengaruh Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah (Lindgaard dan Pieper, 2020). Pendekatan akan kekhawatiran Turki dipahami memiliki beberapa poin yang menarik, namun penulis berpendapat bahwa akuisisi sistem pertahanan S-400 cenderung melenceng secara kontras dari posisi Turki yang berujung memandang aliansinya sebagai oposisi potensial bagi Turki.

Akuisisi sistem pertahanan S-400 oleh Turki dapat ditekankan sebagai pemenuhan akan kebutuhan urgensi sistem pertahanan udara Turki secara cepat dan mendukung kepentingan geopolitik Turki. Egeli (2018) berargumen bahwa kepentingan dan insentif Turki dalam mengakuisisi S-400 setidaknya meliputi dukungan dalam pengembangan sistem tersebut dalam negeri dan memperkuat potensi geopolitik Turki, keinginan Turki dalam menyaingi dan berkolaborasi dengan sekutu NATO dalam bidang pertahanan udara, dan karena alasan urgensi kebutuhan operasional Turki. S-400 diyakini sebagai bentuk usaha sementara (*stopgap measure*) dalam memenuhi urgensi operasional Turki. Urgensi volatilitas kawasan Turki, minimnya sistem pertahanan udara yang efektif, dan keterhambatan akuisisi sistem Patriot menjadi latar belakang penting dalam akuisisi S-400. Di samping itu, akuisisi S-400 dipahami turut memperkuat perhatian dan kesadaran domestik akan sektor industri pertahanan Turki (Kibaroglu, 2019). Akuisisi S-400 turut menandai kepentingan Turki yang ingin semakin independen dari reliansi teknologi Amerika Serikat melalui keinginan industri pertahanan yang berdikari. Kesepakatan S-400 yang dibentuk turut memiliki program transfer teknologi yang mana menjadi preferensi kuat dari sistem Patriot (Giacomini, 2019).

Tidak hanya terbatas dalam pemenuhan kekuatan pertahanan Turki, fenomena akuisisi sistem pertahanan S-400 dapat dipahami dari segi pembangunan relasi hubungan strategis antar

negara. Giacomini (2019) berargumen bahwa alasan utama Turki mengakuisisi S-400 dilatarbelakangi sebagai reaksi persepsi bahwa partner NATO semakin tidak dipercaya. Hal ini dilihat melalui keengganan pembaharuan sistem pertahanan Patriot buatan Amerika Serikat di Turki dan keinginan Turki untuk mengurangi reliansi teknologi NATO untuk diversifikasi teknologi militer Turki. Di tengah berkurangnya reliabilitas sekutu Turki dan isu keamanan regional yang semakin volatil bagi Turki, penguatan hubungan dengan Rusia (dan Iran) menjadi penting (Giacomini, 2019). Pada dasarnya, posisi prioritas strategis Turki terhadap Rusia kerap dihalangi secara kuat dan sistemik oleh aliansi NATO dan Amerika Serikat pada umumnya, meskipun Turki pada dasarnya menginginkan kooperasi lebih dekat dengan Rusia (Şahin, 2019). Berdasarkan pola-pola tersebut, realisasi kesepakatan pembelian S-400 oleh Turki cenderung belum sepenuhnya menjelaskan secara fokus akan implikasi yang dihasilkan akibat pergeseran domestik terhadap pola perilaku dan nilai-nilai Turki.

Berbeda dari bentuk tulisan literatur ilmiah terhadap fenomena tersebut, penulis melalui tulisan ini akan mendalami lebih lanjut mengenai fenomena akuisisi S-400 oleh Turki melalui pergeseran budaya strategis. Lensa budaya strategis dipahami penting untuk memahami redefinisi ancaman Turki. Penulis akan menekankan pada logika strategis Turki yang dominan dalam membentuk pendekatan strategis untuk memenuhi kepentingannya baik untuk kepentingan rezim domestik dan eksternal Turki. Di samping itu, penulis turut menyinggung kepentingan strategis yang ingin dicapai Turki melalui analisis budaya strategis Turki terkait dengan ambisi yang ingin dicapai oleh Turki dan implikasinya terhadap kawasan dan sekutu Turki, khususnya NATO dan Amerika Serikat.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Implikasi Budaya Strategis dalam Membentuk Logika Negara

Identitas negara dan pola perilaku dapat dipahami berkaitan dengan konsep budaya strategis negara dalam membentuk dan memformulasikan suatu kebijakan luar negeri mereka atas faktor-faktor tertentu, terutama faktor domestik. *Strategic culture* atau budaya strategis dapat diklasifikasikan sebagai konsep yang termasuk ke dalam bidang studi keamanan dan pertamakali diperkenalkan pada tahun 1970an (Longhurst, 2004). Pola perkembangan konsep tersebut dapat dipahami muncul bersamaan dengan era kemunculan konsep-konsep Ilmu Hubungan Internasional baru dari polaritas antara Realisme dan Liberalisme di tengah dinamika Perang Dingin. Budaya strategis dapat dipahami dan didefinisikan sebagai suatu perangkat kepercayaan, sikap, dan norma terhadap penggunaan kekuatan, terutama dalam

konteks kekuatan militer, yang diperkuat berdasarkan pengalaman historis (Chappell, 2009 dalam Benneyworth, 2011). Budaya strategis dapat dipahami muncul dari kesadaran akan bagaimana suatu negara dalam memproyeksikan strateginya berdasarkan bagaimana perspektif negara tersebut dalam menginterpretasi dinamika dunia sesuai dengan identitas yang dimilikinya. Hal ini setidaknya dapat dipahami melalui kasus Perang Dingin dalam memahami persepsi doktrin Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mana setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan pendekatan kebijakannya masing-masing sesuai dengan pengalaman dan perkembangan historis dan konstruksi identitas yang terbentuk untuk membentuk budaya pemahaman strategisnya (Longhurst, 2004).

Dalam perkembangannya, budaya strategis memiliki setidaknya empat generasi utama dalam konseptualisasi pendekatan budaya strategis dalam perkembangan studi budaya strategis. Generasi pertama dapat dipahami sebagai bentuk awal konseptualisasi budaya strategis di era Perang Dingin yang diaplikasikan pertama kali oleh Jack L. Snyder pada tahun 1977. Snyder berpendapat bahwa budaya strategis terbentuk melalui proses sosialisasi dari kalangan elit politik yang memiliki peran krusial dan bertanggung jawab dalam eksistensi elemen budaya strategis meliputi nilai, norma, dan pandangan dunia. Proses sosialisasi pandangan prinsipal, pemahaman, dan konsepsi terhadap dunia membentuk inti budaya strategis yang dipindahkan antar generasi elit politik dan kelompok yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan strategis (Snyder, 1977 dalam Akhmetov, 2019). Ide budaya strategis generasi pertama turut diperkuat dengan penekanan oleh Carnes Lord yang mendefinisikan budaya strategis yang terdiri atas praktik tradisional dan kebiasaan pemikiran di mana kekuatan militer diorganisir dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi tujuan politiknya. Faktor yang mempengaruhi pembentukan budaya strategis menurut Lord diidentifikasi meliputi faktor geografi, hubungan internasional, sejarah militer, hubungan sipil-militer, teknologi persenjataan, dan kultur politik (Lord, 1985 dalam Bloomfield, 2012). Faktor ideasional dalam mempengaruhi keputusan dipertegas dengan pernyataan Gray bahwa perilaku strategis tidak bisa terlepas dari budaya yang mana digunakan sesuai dengan konteks dan budaya strategis lebih bertindak sebagai panduan yang dapat mengintervensi untuk menempuh suatu tindakan negara (Gray, 1999). Generasi pertama dipahami mempengaruhi kuat akan bagaimana faktor kultural memiliki peran yang kuat dalam pembentukan pola pikir logis dan persepsi suatu negara.

Generasi kedua dapat dipahami lebih menekankan pada pandangan perbedaan antara aspek kultural dan perilaku penempuh kebijakan. Berbeda dari generasi sebelumnya yang cenderung

lebih berfokus pada asumsi budaya yang tertanam merupakan produk interaksi dari berbagai variabel politik, kultural, dan lingkungan, Bradley Klein lebih menekankan bahwa budaya strategis dibentuk oleh kelompok elit untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing untuk menguak praktik ketidakadilan di ranah perpolitikan nasional dan internasional (Klein, 1988 dalam Tellis, 2016). David Campbell turut menekankan bahwa prioritas strategis dan agenda kebijakan luar negeri lebih dipengaruhi oleh kelompok elit yang berkuasa berdasarkan kalkulasi politik dan menekankan akan marginalisasi rival politiknya dengan mendukung identitas dan narasi yang tepat bagi kelompok yang berkuasa (Campbell, 1992 dalam Akhmetov, 2019). Generasi kedua dipahami menunjukkan bahwa budaya dapat dikomodifikasi sesuai dengan kepentingan pemangku kebijakan dan menaruh perhatian kuat terhadap kelompok elit untuk menentukan budaya strategis negaranya yang mana mempengaruhi kuat akan bagaimana suatu negara memandang dunia internasional berdasarkan narasi atau doktrin yang dibentuk.

Generasi ketiga menekankan pada pendekatan budaya strategis yang lebih bersifat metodologis secara ketat dan berkerangka teoritis yang dipengaruhi kuat dengan aspek Positivisme. Generasi ketiga berfokus pada teorisasi budaya strategis melalui pendekatan positivis dengan konspetualisasi budaya strategis yang diperlakukan sebagai variabel eksplanatif ideasional yang mana menyebabkan suatu perilaku strategis tertentu. Hal ini ditekankan melalui Alastair Iain Johnston yang ingin mengukur efek kausal budaya strategis negara yang relatif dengan kontribusi yang terbentuk atas variabel material seperti geografi ataupun kekuatan relatif ke hasil strategis (Bloomfield, 2012). Generasi ketiga dipahami sebagai bentuk kontinuitas dari generasi-generasi sebelumnya dengan pandangan bahwa institusi tertinggi dalam pengambilan keputusan di dalam negara dipandang sebagai aspek fundamental akan manifestasi budaya strategis negara. Dengan memadukan nilai-nilai sosial dan saintifik, generasi ketiga mengkarakterisasikan budaya strategis sebagai *ideational milieu* yang membatasi pilihan perilaku dan ingin menginvestigasi asumsi bersama dan aturan keputusan yang membentuk tatanan dalam konsepsi hubungan individual dan kelompok terhadap lingkungan sosial, organisasional, atau politik (Tellis, 2016).

Generasi keempat dapat dipahami dengan perkembangan progresif akan bentuk variabel baru yang mempengaruhi dominasi budaya strategis. Penulis mengutip Bloomfield (2012) yang menyatakan bahwa konseptualisasi budaya strategis sebagai bentuk pemikiran kultur tunggal suatu negara pada dasarnya terbentuk melalui berbagai kompetisi sub-kultur negara yang pada dasarnya bervariasi dan terus berkompetisi menjadi ide budaya strategis yang dominan.

Meskipun kekuatan dan distribusi kapabilitas memberikan pemahaman dalam skala yang luas dalam memahami politik internasional pada umumnya, faktor identitas dan ideasional dipahami memiliki relevansi yang kuat karena faktor tersebut mempengaruhi akan bagaimana suatu aktor negara menggunakan kapabilitasnya sesuai dengan ide kultural yang dominan. Melalui budaya strategi, setidaknya dapat diidentifikasi akan bagaimana karakteristik suatu negara dan pendekatan pandangan negara dalam memahami dinamika global, khususnya dalam membentuk persepsi ancaman. Hal ini berakibat penting untuk memahami logika Turki dalam menempuh kesepakatan dengan Rusia yang dipahami dipengaruhi akan bagaimana Turki di bawah Erdoğan memiliki budaya strategis tertentu yang memiliki persepsi ancaman tersendiri.

1.4.2 Dinamika Pergeseran Budaya Strategis dan Sub-kultur Strategis Negara

Budaya strategis dapat dipahami sebagai bentuk pola pikir dan logika negara yang terus berkembang dan bersifat dinamis, khususnya dalam bagaimana suatu ide, nilai, dan norma mendominasi pola pikir pemangku kebijakan suatu negara. Budaya strategis, sesuai dengan situasi dan dinamika yang dihadapi oleh suatu negara, dapat bergeser dan bahkan dapat berubah secara drastis. Budaya strategis dipahami dapat berubah secara perlahan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi seiring dengan pengalaman baru yang didapatkan dan ditranslasikan secara kultural (Gray, 1999). Namun, perlu dipahami bahwa budaya strategis dapat berubah secara drastic hingga pada titik perubahan identitas secara kontras. Hal ini dapat dicontohkan melalui kasus budaya strategis Jerman pasca-Perang Dunia II yang dibentuk kembali atas oposisi pengalaman historisnya pada era Perang Dunia II, khususnya Militerisme dan Ekspansionisme. Hal ini dipahami dapat terjadi karena dominasi elit politik baru yang berkuasa secara sadar menolak fitur-fitur dominan dalam budaya strategis yang lampau dan digantikan dengan elemen-elemen yang berlawanan dari budaya strategis sebelumnya (Karásek, 2015).

Sebelum memahami lebih lanjut akan pergeseran budaya strategis, perlu dipahami terlebih dahulu akan konsep sub-kultur dalam mempengaruhi dinamika dominasi budaya strategis suatu negara. Ide-ide budaya strategis negara dapat dipahami direpresentasikan melalui sub-kultur yang bervariasi yang mana menjadi dasar nilai-nilai negara yang dimiliki. Nilai sub-kultur suatu negara dipahami akan terus berkoeksistensi dan berkompetisi untuk memperoleh pengaruh dominan dalam dinamika pembentukan keputusan strategis. Hal ini ditunjukkan dengan dinamika pola hubungan yang dapat berubah baik dalam bentuk dominan, subordinat, dan laten. Sub-kultur yang sedang dominan dapat dipahami sebagai ide yang memandu

persepsi penempuh kebijakan strategis dan perilaku respon yang dianggap tepat. Sub-kultur yang belum menjadi dominan dapat diklasifikasikan sebagai subordinat yang mana memiliki pengaruh yang terbatas dan laten yang cenderung ada sebagai ide sub-kultur marginal yang dipegang oleh minoritas kecil dengan pengaruh yang hampir tidak ada (Bloomfield, 2012). Kontestasi ide-ide sub-kultur tersebut dipahami terus mengalami dinamika dan potensi perubahan status sub-kultur menjadi yang dominan, baik yang sebelumnya berstatus subordinat dan bahkan laten, tergantung dengan situasi yang dihadapi dan pemangku kebijakan yang mempengaruhi kuat arah negara. Hal ini dipahami berpotensi pada pergeseran budaya strategis melalui dominasi sub-kultur dan ide yang menjadi dominan dalam komunitas elit pembentuk kebijakan negara yang mempengaruhi akan bagaimana ide dan persepsi ancaman suatu negara.

Menurut Karásek (2015), pergeseran dalam budaya strategis dapat dikonseptualisasikan melalui tiga skema utama. Tingkatan pertama berawal dari posisi suatu sub-kultur strategis negara yang ditoleransi namun dimarginalisasi, khususnya dalam status subordinat. Tingkatan kedua ditandai dengan momen ketika konsep baru mulai masuk dan diterima bagi diskursus sub-kultur strategis yang dominan, yang mana menjadikan ide tersebut sebagai hal yang konvensional atau diterima dalam diskursus *mainstream*. Tingkatan terakhir ditandai dengan ekspansi sub-kultur strategis yang sebelumnya berstatus subordinat terhadap sub-kultur strategis yang sebelumnya dominan dan menggantikan budaya strategis yang ada, sehingga membentuk paradigma strategis yang baru (Karásek, 2015). Melalui logika akan dinamika pergeseran budaya strategis, ide-ide sub-kultur negara dipahami akan terus berkontestasi untuk meraih dominasi nilai dan pola pikir strategis suatu negara. Hal ini dipahami direpresentasikan dengan ide pemikiran pemangku kebijakan yang terus berkompetisi secara domestik dalam dinamika diskursus suatu negara. Melalui kontestasi dominasi pola pikir strategis tersebut dipahami berpengaruh pada logika keputusan strategis negara yang mana mempengaruhi pola persepsi negara akan apa bentuk ancaman yang akan kepentingan nasionalnya dan bagaimana merespon ancamannya sesuai dengan budaya negara dalam lingkup internasional (Wasilewski, 2017). Dalam kasus Turki, ide-ide sub-kultur yang menjadi perhatian tulisan ini adalah ide Neo-Ottomanisme dan Republikan Kemalisme yang dipahami sebagai sub-kultur kompetitif dalam diskursus *mainstream* Turki.

1.4.3 Sub-Kultur Strategis Turki: Republikan Kemalisme dan Neo-Ottomanisme

Budaya strategis Turki dipahami terdiri dari berbagai variasi sub-kultur yang terus berkompetisi untuk meraih posisi yang dominan. Melalui tulisan ini, penulis akan berfokus

pada dua ide sub-kultur yang dipahami mendominasi diskursus *mainstream* pemikiran nilai identitas Turki secara intens, yakni ide Neo-Ottomanisme yang direpresentasikan melalui AKP dan ide Republikan Kemalisme yang direpresentasikan melalui RPP. Sub-kultur strategis Republikan Kemalisme dapat dipahami sebagai salah satu ide yang terlibat kuat dalam diskursus *mainstream* Turki modern. Sub-kultur tersebut dipahami berakar dari pengalaman historis kekalahan Turki pada Perang Dunia I yang muncul atas proses kecurigaan akan pengaruh eksternal. Dengan pengalaman Era Ottoman, ide modernisasi menjadi salah satu fokus budaya strategis Turki untuk mensejajarkan posisi Turki dengan peradaban kontemporer di bawah ide Kemalisme (Wasilewski, 2017) Budaya strategis Turki pada masa tersebut cenderung berfokus pada narasi persatuan nasional. Perjanjian Sèvres pada tahun 1920 dipahami sebagai determinan utama yang menimbulkan persepsi kecurigaan kekuatan asing terhadap partisi Turki yang mengakibatkan fokus Turki terhadap integrasi domestik. Di samping karakteristik tersebut, ide fokus persatuan nasional turut membentuk keengganan Turki untuk terlibat dalam konflik lain dan kerap berada dalam posisi netral dengan beberapa pengecualian (Vinken, 2018). Sub-kultur Republikan Kemalisme turut menekankan pentingnya militer dalam perpolitikan Turki, khususnya dalam konteks mempertahankan dari gerakan separatis Kurdi yang menimbulkan Pesismisme (Alibabalu, 2020). Pola sub-kultur strategis Republikan Kemalisme tersebut dapat dipahami memiliki persepsi ancaman akan pengaruh eksternal yang dianggap muncul atas dukungan aktor eksternal dan prioritas kepentingan Turki untuk integrasi dan pembangunan domestik Turki.

Sub-kultur strategis ide Neo-Ottomanisme di sisi lain dapat dipahami sebagai ide yang lebih menekankan Turki sebagai aktor yang lebih asertif secara regional. Narasi Turki sebagai kekuatan regional, khususnya dalam lingkup kawasan tetangganya, dipahami menjadi narasi utama ide Neo-Ottomanisme dengan beberapa perbedaan dari ide Ottoman. Ide Neo-Ottomanisme dipahami sebagai alat dalam meraih status kekuatan regional dengan mengkombinasikan pandangan multinasional dan apresiasi Islam. Ide Neo-Ottomanisme ditunjukkan melalui Perdana Menteri Ahmet Davutoğlu dari AKP yang mengsuggestikan akan pengalaman historis dan geografis Turki yang mana memberikan Turki obligasi dalam melakukan pendekatan regional terhadap isu internasional (Vinken, 2018). Ide budaya strategis Neo-Ottomanisme dapat dipahami sebagai bentuk proyeksi kepentingan Turki dalam keinginannya untuk mensintesis sejarah Ottoman dan Islamis Turki secara domestik maupun internasional. Hal ini dipahami dapat dilakukan melalui Multikulturalisme untuk membuka dialog di antara Timur dan Barat dan secara aktif melakukan kebijakan luar negeri,

khususnya dalam kawasan Balkan, Timur Tengah, dan Kaukasia (Akhmetov, 2019). Refleksi ide Neo-Ottoman terhadap sejarah era Ottoman dipahami menjadi bentuk untuk mengembalikan posisi Turki sebagai negara yang signifikan dalam dinamika geopolitik internasional, khususnya dalam konteks konsolidasi pengaruh regional. Untuk memahami karakteristik kedua sub-kultur strategis Turki dapat dipahami melalui tabel berikut:

Tabel 1.1: Perbedaan Karakteristik Ide Sub-Kultur Utama Turki

Ide Sub-Kultur Republikan Kemalisme	Ide Sub-Kultur Neo-Ottomanisme
• Obsesi terhadap homogenitas dan persatuan. • Kecurigaan terhadap kekuatan dan musuh asing, termasuk sekutu, terhadap persatuan internal. • Konsepsi keamanan, kedaulatan, dan integritas wilayah yang sempit dan terbatas. • Keengganan dalam berkompromi. • Keengganan dalam keterlibatan konflik eksternal.	• Menerima identitas internal yang beragam. • Menyeimbangkan orientasi Barat-Timur • Keinginan dalam menjadi kekuatan politik, militer, dan ekonomi kawasan. • Etos Aktivisme internasional (hingga Intervensionisme). • Konsepsi kepentingan keamanan yang mencakup di luar integritas teritorial.

Sumber: Evans, 2014a dan 2014b

Ilustrasi tersebut dapat dipahami menggambarkan akan dua ide utama yang secara kuat dikontestasikan dalam tatanan elit politik Turki untuk meraih posisi dominan yang mana mempengaruhi pendekatan keputusan kebijakan luar negeri Turki. Melalui isu pembelian S-400, hal ini dapat dipahami memiliki implikasi kuat akan latar belakang kontestasi sub-kultur strategis Turki. Dalam perspektif Turki yang terikat dengan NATO, persepsi ancaman Turki setidaknya dipahami mencakup Rusia sebagai variabel ancaman. Namun tindakan pembelian S-400 dari Rusia cenderung lebih memberi pertanyaan bahwa apakah hal tersebut merupakan pemenuhan kepentingan budaya strategis dominan Turki atau hanya sebuah miscalculasi kebijakan strategis Turki.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki hipotesis bahwa kesepakatan sistem pertahanan udara S-400 Rusia kepada Turki didorong oleh faktor

pergeseran budaya strategis Turki yang mempengaruhi persepsi ancaman dan kepentingan Turki yang baru di bawah pergeseran dominasi ide sub-kultur strategis Neo-Ottomanisme yang mengedepankan konsolidasi posisi Turki secara regional.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Budaya Strategis Turki

Budaya strategis Turki dipahami berkaitan erat dengan warisan identitas dan geografis Turki sebagai negara signifikan dalam kawasan Eropa dan Timur Tengah bersamaan dengan pengalaman imperialis Turki di era Ottoman yang secara tidak langsung menempatkan Turki sebagai salah satu variabel aktor signifikan di Eropa. Perpaduan atas pengalaman memori budaya keamanan, politik, dan geografis Turki dipahami menjadi faktor determinan dalam pembentukan logika kebijakan luar negeri Turki. Karakteristik utama budaya strategis Turki modern, setidaknya hingga pada tahun 2000-an, meliputi pada tendensi elemen homogenitas etnis dan agama, perasaan insekuritas terhadap elemen asing, menghindari risiko (Alibabalu, 2020). Namun, perlu dipahami bahwa budaya strategis terus berkembang sesuai dengan dinamika yang dihadapi. Ide-ide budaya strategis Turki dipahami secara kuat terus berkembang atas perpaduan berbagai visi strategis. Kebijakan luar negeri Turki setidaknya dipengaruhi oleh dua identitas yang meliputi nilai Neo-Ottomanisme dan Kemalisme. Ide Neo-Ottomanisme dapat dipahami sebagai penemuan kembali warisan imperialis Turki dengan pendekatan Islamis. Ide Kemalisme lebih menekankan pada kehati-hatian dengan fokus integrasi domestik (Taşpınar, 2011).

Budaya strategis Turki pada dasarnya bertumpu erat terhadap komunitas elit dan penentu kebijakan Turki yang berkuasa. Menurut Akhmetov (2019) dipahami bahwa adanya persepsi kekuatan militer sebagai ekstensi dan suplemen diplomasi bagi pembentuk kebijakan Turki, namun penggunaan elemen militer cenderung secara kuat digunakan dalam diplomasi daripada perang. Hal ini dipahami sebagai preferensi diplomasi yang lebih diutamakan dalam melakukan pendekatan kebijakan luar negeri meskipun melibatkan elemen militer yang dilatarbelakangi oleh kompetisi domestik, ketakutan isolasi diplomasi, hingga legitimasi Turki sebagai negara damai. Di samping utilisasi militer sebagai alat suplemen diplomasi, budaya strategis Turki dipengaruhi oleh interaksi antara proses politik domestik dan manifestasi budaya strategis Turki. Pemimpin politik Turki turut dipahami sebagai faktor utama dalam

dinamika budaya strategis Turki pada titik di mana pengaruhnya mampu memutuskan penggunaan kekuatan militer (Akhmetov, 2019).

1.6.1.2 Persepsi Ancaman dan Kepentingan

Persepsi ancaman dapat dipahami memiliki keterkaitan dan berkomplemen dengan kepentingan negara, khususnya terhadap implikasi kepentingan yang menentukan faktor dan variabel yang dianggap mengancam kepentingan yang ingin ditempuh. Konseptualisasi persepsi ancaman dapat dipahami melalui konstruksi model ancaman yang memahami persepsi ancaman sebagai garis di antara *in-group* dan *out-group*. Melalui model pendekatan konstruksi ancaman, kekuatan mempengaruhi persepsi ancaman masyarakat hanya setelah identitas di antara identitas pribadi dan identitas aktor lain telah terbentuk. Apabila identitas pribadi tidak memiliki korelasi atau identitas bersama dan kesetaraan materiil kekuatan antara kedua entitas dipahami menjadi determinan yang kuat dalam pembentukan persepsi ancaman. Di sisi lain, apabila tingkat identitas bersama dengan korelasi yang semakin tinggi dipahami entitas yang berlawanan dianggap kurang mengancam (Rousseau dan Garcia-Retamero, 2007). Pemahaman akan interaksi identitas kedua aktor tersebut dalam membentuk persepsi ancaman satu sama lain dipahami turut dipengaruhi akan bagaimana kepentingan masing-masing aktor dalam berinteraksi, khususnya terhadap potensi konvergensi, friksi, atau tidak bertabrakan. Negara dipahami memiliki kepentingan secara institusional. Hal ini dipahami berkaitan dengan bagaimana suatu pemimpin negara menstrukturkan problematika yang dapat meningkatkan signifikansi dan dorongan untuk solusi kepentingan yang ingin diraih. Kepentingan institusional tersebut dipahami dapat terbentuk dan meraih keuntungan baik melalui tingkatan persepsi ancaman yang tinggi maupun rendah (Stein, 2015).

1.6.1.3 Neo-Ottomanisme

Pendekatan Neo-Ottomanisme dapat dipahami sebagai bentuk visi yang dibentuk oleh AKP yang dibangun oleh pendekatan mantan Presiden Turgut Özal setelah Perang Dingin berakhir. Neo-Ottomanisme menurut Taşpınar (2011) dapat dipahami sebagai penemuan kembali warisan imperial dan ide akan negara Turki yang multi-identitas. Ide Neo-Ottomanisme dipahami sebagai pengingat Turki sebagai kerajaan multinasional dari Timur Tengah, Afrika Utara, Balkan, dan Eropa Tengah dengan penekanan penyeimbangan dan perluasan pandangan geostrategis Turki untuk bergeser dari trayektori yang terlalu pro-Barat. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mendefinisikan tendensi Neo-Ottoman AKP. Pertama, Neo-Ottomanisme tidak berkeinginan untuk membangun kembali kekaisaran Ottoman dengan ambisi teritorial,

melainkan lebih menekankan pada versi moderat akan Sekulerisme secara domestik dan kebijakan luar negeri yang lebih aktif yang diutamakan melalui *soft power*. Kedua, karakteristik Neo-Ottomanisme dipahami sebagai rasa *grandeur* dan kepercayaan diri dalam kebijakan luar negeri, khususnya sebagai *superpower* regional dengan refleksi lingkup Ottoman dan Bizantium. Ketiga, Neo-Ottomanisme bertujuan untuk merangkul Barat bersamaan dengan dunia Islam, terutama peran Turki sebagai penghubung dunia Eropa dan Asia yang mana menjadi urgensi penting bagi Turki untuk diidentifikasi sebagai bagian dari Eropa (Taşpınar, 2011). Ide Neo-Ottomanisme turut dipahami sebagai ide yang menuntun Turki untuk bersikap lebih asertif. Hal ini dipahami sebagai ide yang berfokus pada kepercayaan Turki dan kesadaran atas potensi Turki untuk menempuh peran yang lebih memimpin di kawasannya (Vinken, 2018).

1.6.1.4 Konsolidasi Posisi atau Status Aktor

Teori akan *positioning* atau penempatan dapat dipahami sebagai konsep akan penempatan peran suatu aktor terhadap dinamika tertentu. Perbedaan utama antara peran dan posisi dapat dipahami melalui spektrum fleksibilitas yang ada dengan peran yang lebih dipersepsikan sebagai sifat yang tetap dan posisi yang cenderung bersifat fluktuatif. Teori penempatan dalam Studi Hubungan Internasional dapat menjadi alternatif dari teori peran dengan aspek utama teori penempatan sebagai alternatif yang dinamis. Konsep posisi dapat dipahami sebagai suatu kumpulan hak dan tugas sementara untuk berbicara dan bertindak dalam bentuk cara tertentu (Baert, et al., 2019). Pola penempatan dalam ranah internasional dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pengambilan peran dan kapabilitas dalam ranah internasional dengan dasar legitimasi yang kuat untuk menjustifikasi aksinya untuk memenuhi suatu tindakan tertentu.

Pola dalam melakukan penempatan dalam ranah internasional turut berkembang dan fluktuatif sesuai dengan dinamika global. Dalam era kontemporer yang mengakibatkan politik dunia semakin bergerak ke arah multidimensional dan berbagai bentuk mengakibatkan perubahan substantif yang mempengaruhi peran dan posisi relatif negara yang berubah, dan bahkan secara dramatis (Costalli dan Ruggeri, 2020). Pola penempatan terhadap suatu aktor internasional secara tidak langsung menjadi bentuk penetapan peran dan hak, seperti hak intervensi, dalam ranah internasional dan membentuk obligasi untuk memenuhi peran atas posisi tersebut sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Penggunaan teori penempatan dapat digunakan sebagai alat untuk memahami proses kognitif suatu aktor yang terlibat dalam politik global dan untuk memahami hubungan antar negara dengan aktor lain (Baert, et al., 2019). Melalui pemahaman

tersebut, penempatan posisi aktor dalam perpolitikan global dipahami dapat menjadi keuntungan tersendiri untuk meraih suatu bentuk konsolidasi kekuatan dan legitimasi sebagai aktor yang signifikan baik dalam skala internasional maupun kawasan tertentu, khususnya bagi negara yang berstatus *superpower*.

1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pola tipe eksplanatif dalam menjelaskan pertanyaan penelitian yang diawali dengan ‘mengapa’. Melalui desain penelitian eksplanatif, penelitian dapat difokuskan dalam menjelaskan fenomena yang menjadi topik penelitian secara mendalam dan mengidentifikasi problematika yang sebelumnya belum diteliti sepenuhnya. Penelitian eksplanatif pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan informasi deskriptif dengan mencari akar dari permasalahan dan alasan mengapa suatu fenomena tertentu dapat terjadi melalui pembuktian untuk mendukung atau membantah suatu eksplanasi atau prediksi lain (Boru, 2018). Melalui tulisan ini, penulis memiliki tujuan utama dalam menjawab rumusan masalah dan pembuktian hipotesis penulis dengan batasan teoritik yang telah ada. Melalui utilisasi teori-teori yang ada, penelitian ini akan fokus membahas mengenai alasan mengapa Turki bersedia melakukan perdagangan senjata secara langsung kepada Rusia di tengah keterikatannya dengan NATO.

1.6.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada perspektif Turki dalam melakukan kesepakatan perdagangan senjata dengan Rusia melalui berbagai faktor domestik dan luar negeri Turki, khususnya dalam implikasi budaya strategis Turki, yang berujung pada realisasi kesepakatan perdagangan sistem pertahanan udara S-400 hingga tahun 2022. Di samping itu, jangkauan waktu penelitian yang berkaitan dengan fenomena pembahasan dimulai dari tahun 2002 yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh partai AKP Turki dan perkembangan nilai Neo-Ottomanisme Turki. Tetapi, penulis tidak menutup kemungkinan dalam meliputi data sebelum tahun 2002 apabila bermanfaat bagi penelitian ini. Data-data tersebut dapat meliputi sebagai penyertaan latar belakang fenomena dan fakta prekondisi yang ada sebelum mencapai inti lingkup penelitian secara sekilas.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pola pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan pada umumnya meliputi bentuk laporan, dokumen,

pidato, dan artikel resmi dari pemerintah Turki, Rusia, hingga meliputi Timur Tengah, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sumber-sumber primer tersebut diperoleh melalui sumber daring baik melalui situs resmi pemerintah, program pemerintah, hingga situs pihak ketiga yang terkait dengan pemerintah. Dalam lingkup sumber sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan ilmiah, artikel daring yang kredibel, pemberitaan media akuntabel, hingga sumber daring lainnya yang akuntabel dan kredibel.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Melalui penelitian ini, penulis akan menggunakan metode teknik *qualitative content analysis*. Metode tersebut digunakan untuk difokuskan pada penggunaan interpretasi dan pemaknaan penulis melalui data dan teori yang tersedia dan digunakan sesuai penelitian yang ditempuh. Melalui Teknik tersebut turut digunakan untuk mengeliminasi data yang ada dan menyisakan data yang kredibel dan relevan bagi topik penelitian yang ditempuh untuk dianalisis dan disajikan hingga terbentuk kesimpulan. Dengan terbentuknya kesimpulan atas hasil dari analisis data, kesimpulan tersebut digunakan untuk pembuktian hipotesis penulis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka teoritik, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab kedua berisi pengalaman sejarah Turki, ide-ide budaya strategis atau sub-kultur strategis Turki, dan implikasi kontestasi sub-kultur strategis Turki. Bab ketiga berisi dengan pembahasan analisis dominasi sub-kultur Neo-Ottomanisme terhadap dinamika kebijakan luar negeri Turki dan faktor persepsi Turki terhadap dinamika kawasan yang mempengaruhi keputusan Turki dalam melakukan perdagangan sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Bab keempat berisi dengan implikasi dan nilai strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Turki sesuai dengan budaya strategis Turki dari keputusan tersebut dan persepsi kepentingan yang diraih oleh Turki dalam konteks ambisi sub-kultur Neo-Ottomanisme. Sedangkan bab terakhir, bab lima, berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh.